

**MENOLAK PEMEKARAN UNTUK
MEMPERTAHAKAN SEBUAH ADAT ISTIADAT :
SEBUAH UPAYA KOMUNIKASI POLITIK DAN DIPLOMASI
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DARI MASYARAKAT
DESA LAPANDEWA SULAWESI TENGGARA**

M. Najib Husain
Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara
najib_75husain@yahoo.co.id

Abstrak

Komunitas masyarakat adat di Buton di bawah kepemimpinan lokal, yang disebut Parabela, selama ini telah menjaga kadie (kampung) bersama kepala desa baik dalam bidang pemerintahan, sosial, kesehatan dan ekonomi. Bila ada pelanggaran di kampung maka yang melanggar akan dilaporkan Sara kadie (Perangkat Adat) untuk diberikan sanksi sosial sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Namun sejak UU otonomi daerah No. 22 Tahun 1999 diberlakukan, banyak terjadi pemekaran pada tingkat desa, yang menyebabkan pergeseran posisi para pemimpin tradisional, yang disebut Parabela. Salah satu rencana pemekaran yang dimulai sejak tahun 2010, adalah pemekaran desa Lapandewa menjadi 2 desa dan rencana ini ditolak oleh parabela dan perangkat adat Lapandewa, masyarakat serta kepala desa namun ternyata rencana ini tetap dilanjutkan sampai ditetapkan dalam sebuah Perda untuk memekarkan desa Lapandewa menjadi Desa Lapandewa dan Desa Lapandewa Jaya, namun hasil rapat paripurna dewan tidak bisa dilaksanakan sampai saat ini karena masyarakat tidak pernah mengusulkan dan menolak perda tersebut. Kekompakan yang terjalin pada masyarakat di desa Lapandewa tidak terlepas dari peran komunikasi politik yang dijalankan oleh para elit lokal dengan menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci : Menolak Pemekaran, Mempertahankan Sebuah Adat Istiadat.

Pendahuluan

Pembentukan/pemekaran daerah pada dasarnya dimaksudkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah melalui pengelolaan secara terencana dan berkesinambungan (*Sustainable*) terhadap potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sejak UU otonomi daerah No. 22 Tahun 1999 diberlakukan, isu pemekaran lebih dominan jika dibandingkan dengan isu penggabungan atau penghapusan daerah otonom. Hal ini juga terjadi pada wilayah kabupaten Buton, yaitu sejak tahun 2003 terjadi peningkatan status Bau-Bau dari Kota administratif menjadi kota berdasarkan UU No. 13 tahun 2001, ini berarti telah terjadi pembagian wilayah antara kota bau-bau yang ibu kotanya di Bau-Bau dan Kabupaten Buton yang pada mulanya berada di Bau-bau di pindahkan ke Pasarwajo. Perubahan ini juga berpengaruh pada kawasan tanah kaombo di wilayah parabela serta terjadinya pergeseran posisi para pemimpin tradisional yang disebut Parabela sebagai pemimpin sara kadie (Perangkat Adat). Schoorl (2003) menyatakan dewan *sara kadie* yang dikepalai oleh Parabela yang dapat disamakan dengan jabatan sultan yang tetap menjalankan Pesta Adat dan Hukum Adat. Yang sampai saat ini masih tetap menunjukkan perannya dalam masyarakat Buton khususnya dalam acara-acara yang sangat penting bagi masyarakat seperti Kelahiran, kematian, pertunangan, perkawinan dan pesta panen. Semua ini berjalan karena proses komunikasi yang dijalankan oleh Parabela kepada masyarakat dapat diterima dan dipahami sehingga masih mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat takimpo dan beberapa wilayah yang masih menjalankannya.

Sehingga setiap aktivitas masyarakat harus mendapatkan restu dari pemimpin yang dikenal dengan sebutan parabela,

ketika ia sudah dinobatkan sebagai pemimpin adat dan sekaligus sebagai pemimpin spiritual. Seorang pemimpin harus menjadi panutan masyarakat dan hidup seadanya tanpa harus mengejar materi sehingga keseimbangan hidup dengan alam juga tetap terjaga sebagai sebuah jaringan yang saling membutuhkan. Prinsip hidup ini yang menjadi pedoman dan perilaku hidup masyarakat Buton dan juga didalamnya mengajarkan bahwa masyarakat harus lebih bersahaja dari pada pemimpinnya. Kalau misalnya terjadi gagal panen atau musim paceklik, maka orang yang pertama merasakan lapar adalah Parabela. Sebaliknya, jika panen berhasil, maka para wargalah yang harus lebih dahulu dipersilahkan untuk menikmatinya, sedangkan Parabela menikmati belakangan. Kondisi ini membutuhkan adanya komunikasi dialogis, yaitu antara parabela dan masyarakat dalam menjelaskan problem di lapangan agar terjalin pengertian bersama (*mutual understanding*) dan empati lebih besar karena keduanya saling berdekatan dan rasa saling menghormati bukan karena pertimbangan ekonomi, melainkan masing-masing adalah manusia yang tampak di hadapan mata.

Parabela dapat menjalin komunikasi dialogis antara pemerintah dan masyarakat, komunikasi antara ketiga pihak seharusnya tidaklah terlalu sulit dilaksanakan mengingat kultur bangsa ini memang sangat memungkinkan untuk itu. Suasana komunikasi dialogis dalam kelompok masyarakat Buton diharapkan akan selalu terjadi kesetaraan dan saling memberi menerima secara adil. Umumnya, akan terjadi keakraban dan kesederajatan di antara orang-orang yang memiliki kesamaan dan kesederajatan di antara orang-orang yang memiliki kesamaan yang disebut Wilbur Schramm sebagai *frame of reference* (kerangka referensi) dan *field experience* (kesamaan pengalaman) sehingga komunikasi dapat berjalan secara efektif.

Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah dan pemekaran wilayah di Kabupaten Buton, telah menimbulkan konflik antara parabela Rongi dan perangkatnya yang disebabkan oleh ketidakpatuhan perangkatnya terhadap kepemimpinan parabela serta semakin berkurangnya jumlah parabela di masyarakat yang

pada awalnya berjumlah 72 parabela yang aktif telah berkurang menjadi 21 parabela yang aktif (Rahman, 2005). Adapun parabela yang tidak aktif hanya pada tataran nama dan tidak mampu menjalankan peran di masyarakat disebabkan tidak adanya keinginan dari masyarakat untuk mempertahankan keberadaan parabela di masyarakat. Implikasi Undang-Undang Otonomi daerah dan pemekaran juga telah menyebabkan konflik antara parabela dengan sesama parabela yang disebabkan oleh ketidakjelasan batas wilayah sejak adanya pemekaran wilayah dan konflik parabela dengan pemerintah desa (Rahman, 2005).

Ini berarti telah bertentangan dengan nafas pembentukan daerah, bahwa pembentukan daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembagunan daerah. Disamping itu, pembentukan daerah juga mengandung arti bahwa daerah tersebut harus mampu melaksanakan otonom daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Dalam pada itu, penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Dengan demikian pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dengan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan terbentuknya daerah dan diberikan otonomi daerah.

Sisi kelabu pemekaran daerah tidak menyebabkan proses dihentikan, tetapi terus berlanjut pada tingkat desa atau kelurahan. Yang mana rencana pemekaran tersebut berlangsung di beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Buton, yang salah satunya pada Desa Lapandewa. Namun, ditolak oleh perangkat adat, kepala desa dan masyarakat dengan pertimbangan akan menyebabkan perpecahan dalam tatanan adat istiadat dan akan memporakporandakan

eksistensi hak-hak atas penguasaan sumberdaya agraria komunitas adat di Desa Lapandewa. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian bagaimana proses komunikasi politik yang dijalankan pada masyarakat Lapandewa dalam menolak pemekaran desa.

Metode

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini menggunakan acuan dari James P. Spradley dalam (*developmental research sequence*) yang harus di tempuh oleh peneliti etnografi.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Buton secara keseluruhan sesungguhnya bukanlah merupakan masyarakat yang homogen, mereka terkelompok kelompok berdasarkan sub etnis dan Bahasa yang berbeda. Berdasarkan sub etnis orang Buton terbagi atas : Sub etnis *Wolio* mendiami wilayah keraton Buton atau kota bau-bau saat ini, Sub etnis *Cia-cia* yang mendiami wilayah kecamatan Pasamajo, Sampolawa dan sekitarnya. - Sub etnis *Laporo* tersebar hampir seiuruh daratan pulau Buton. Sub etnis *Moronene* mendiami wilayah Pulau Kabaena, serta Rumbia, kasipute dan Poleang di jazirah Tenggara Sulawesi. - Sub etnis *Wakatobi* mendiami kepulauan Tukang besi di bagian Timur Pulau Buton. - Sub etnis *Muna* mendiami Pulau Muna.

Jadi pada dasarnya orang Buton tersebut hanya nampak satu jika dilihat dari luar saja, namun jika kita mempelajari lebih jauh, maka kita akan menemukan fakta bahwa mereka terdiri dari beberapa sub etnis dengan bahasa yang berbeda-beda pula. Secara vertikal pada zaman dahulu pada masyarakat Buton terbagi atas tiga golongan, yaitu :

1. Kaomu/Lalaki atau bangsawan,
- 2). Walaka, dan
- 3). Papara.

Golongan *Kaomu* atau *Lalaki* ini merupakan keturunan dari raja pertama Wa kaa kaa dengan Sibatara putra raja Majapahit (Zaenu.1985:9). Golongan ini kemudian diberi gelar *La Ode* untuk laki-laki dan *Wa Ode untuk* perempuan. Para raja / sultan dipilih dari golongan ini.

Golongan *Walaka* merupakan keturunan dari *mia patamiana* (orang yang empat) yang menurut masyarakat setempat adalah para pendatang dari Melayu yang kemudian mendirikan kerajaan Buton. Golongan *Walaka* inilah yang memilih, mengangkat dan memberhentikan seorang raja atau sultan. Dalam sejarahnya terdapat beberapa orang Sultan yang diberhentikan oleh mereka, seperti : Sultan Mardan Ali yang narus di eksekusi mati oleh musyawarah sara karena berbuat maksiat.

Golongan *Kaomu* (bangsawan) dan *Walaka* ini jumlahnya relatif sangat sedikit jika dibandingkan dengan golongan *Papara*. Mereka hanya mendiami wilayah keraton dan sekitarnya serta menggunakan bahasa *Wolio*. Sedangkan lapisan ketiga dari masyarakat kesultanan Buton adalah golongan *Papara* tersebar di seluruh Kadie dalam wilayah kesultanan Buton dan menggunakan bahasanya masing-masing (Bahasa : *Muna, Pencana, Cia-cia*, dan lain-lain). Mereka memiliki peluang untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada di *Kadie-nya* masing-masing. Namun demikian mereka tidak memiliki peluang untuk menduduki jabatan di pemerintahan pusat (kerajaan).

Walaupun masyarakat Buton zaman dulu ini terbagi atas tiga golongan besar tadi (*Kaomu, Walaka* dan *Papara*), namun demikian mereka tetap merupakan satu kesatuan yang bulat dan sating membutuhkan seperti yang tercermin dalam peribahasa mereka "*poromu inda sangu, pogaa inda kolota* " yang artinya "bersatu tidak padu berpisah tidak berantara". Maksudnya mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, ketiganya saling membutuhkan untuk menjaniin kehidupan bersama. Jika di ibaratkan ketiga golongan tersebut sebagai buah kelapa yang terdiri dari tiga bagian yakni, kulit luar atau sabot dimisalkan sebagai golongan *papara*, batok kelapa

sebagai kaum *Walaka* dan daging kelapa sebagai kaum *Lalaki/kaomu*, ketiga lapisan ini harus ada agar sebuah kelapa dapat tumbuh dengan baik menjadi pohon kelapa yang tinggi dan besar. Ini berarti bahwa ketiga kaum tersebut harus tetap bersatu untuk menjamin kelangsungan hidup kerajaan/kesultanan. Hal ini berarti pula antara golongan yang satu dengan golongan yang lain tidak boleti saling meremehkan, karena mereka hidup bersama dalam kondisi yang saling membutuhkan. Tidak mungkin pemerintahan (*Kaomu* dan *Walaka*) tetap ada bila tidak ada rakyat (*papara*) demikian pula sebaliknya. Ada rakyat (*papara*) tanpa adanya pemerintahan.

Kondisi saat ini perlapisan dalam masyarakat Buton itu sudah tidak begitu nampak lagi kecuali pada tingkat kadie yang dulunya berjumlah 72 *Kadie*. Wilayah *Kadie* ini langsung dibawah oleh pemerintahan pusat, hal ini dapat dilihat dari setiap *Kadie* diawasi langsung oleh seorang utusan pemerintahan pusat yang disebut *Bonto* atau *Bobato*. Sebanyak 40 *Kadie* diawasi oleh *Bobato* yang berasal dari golongan *Kaomu* (kaum bangsawan) dan 30 *Kadie* diawasi oleh *Bonto* yang berasal dari golongan *Walaka*. Sedang *Sarana Kadie* dipimpin oleh *Parabela* dan atau *Pangalasa*.

Keberadaan *Parabela* yang masih memegang peran dalam kehidupan keseharian masyarakat Buton tentu tidak lepas dari persepsi masyarakat terhadap *Parabela* dan bagaimana *Parabela* bertingkah laku serta menjalankan peran yang diembannya tersebut. Kombinasi dari dua arah ini yaitu persepsi dan masyarakat terhadap *Parabela* dan kemampuan *Parabela* berbuat seperti yang diinginkan oleh masyarakatnya inilah yang membuat tetap eksis di tengah masyarakat yang sedang berubah.

Proses Penolakan Pemekaran Desa Lapandewa

Usulan pemekaran desa Lapandewa telah diupayakan sejak akhir tahun 2009 oleh 53 kepala keluarga dengan membuat proposal pemekaran desa yang ditanda tangani oleh sekretaris desa yang saat itu menjadi Pjs Kepala desa Lapandewa. Dimulai sejak awal tahun

2010-an upaya tersebut dan semakin menguat ketika mendapat dukungan dari Camat Lapandewa untuk memberikan surat pengantar proposal pemekaran untuk dibawa ke Dewan Kabupaten Buton tanpa terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan Parabela, seluruh perangkat adat dan tokoh-tokoh masyarakat di desa Lapandewa.

1 Maret 2010 proposal yang di tanda tangani pejabat kepala desa Lapandewa (Sekdes Drs. La Jetu) dimasukkan di DPRD Kabupaten Buton dan langsung mendapat reaksi penolakan dari masyarakat dan dianggap batal oleh masyarakat karena hanya ditanda tangani oleh PJS. Lalu terjadi demo di kantor kecamatan Lapandewa yang dipimpin oleh Parabela Lapandewa dan beberapa orang perangkat adat.

Pada tanggal 2 Februari 2011 Camat Lapandewa menyampaikan kepala desa untuk mengumpulkan masyarakat dan bertemu di Baruga. Saat pertemuan dilaksanakan hanya 20 % yang mendukung dilaksanakan pemekaran Desa Lapandewa dan ada 80 % Warga menolak pemekaran, dengan alasan karena selama ini tidak ada musyawarah di tingkat desa baik saat penyusunan proposal pemekaran sampai saat pengusulan di DPRD Kabupateb Buton.

Walaupun telah dilakukan pertemuan yang dipimpin langsung oleh Camat Lapandewa tetapi hasil pertemuan tidak dilanjutkan ke dewan, sehingga pada tanggal 14 february 2011 akan diadakan Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Buton untuk menetapkan pemekaran Desa Lapandewa menjadi 2 desa.

Saat itulah proses komunikasi politik dijalankan oleh para elit-elit local di Desa Lapandewa untuk menolak keputusan dan kebijakan yang akan ditetapkan oleh DPRD, hasilnya diputuskan 50 orang untuk berangkat menuju ke gedung dewan yang dipimpin oleh parabela dan tokoh-tokoh adat serta pa desa menghadap ke dewan dengan satu komitmen **1 Desa 1 Adat**. Dalam tataran prakteknya, lobyapun dilakukan untuk mempengaruhi anggota legislatif oleh beberapa generasi muda Lapandewa.

Konsekuensi dari proses komunikasi politik ini adalah lahirnya waktu yang harus dibutuhkan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam artian, setiap pengambilan keputusan yang dibahas, membutuhkan waktu yang kadang tidak sedikit. Bahkan beberapa contoh kasus dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, sebelumnya cukup alot dibahas antara pihak eksekutif maupun legislatif dengan memakan waktu yang cukup lama, sebelum keputusan itu ditetapkan. Sehingga keputusan baru ditetapkan pada 16 februari 2011 lewat Rapat Paripurna Dewan Kabupaten Buton ditetapkan bahwa desa Lapandewa dimekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Lapandewa dan Desa Lapandewa Jaya (baru).

Kamis 17 Februari 2011 diadakan pertemuan akbar warga desa Lapandewa di baruga atau galampa dan hasilnya diputuskan menolak pemekaran, pertemuan ini dipimpin langsung oleh Parabela. Di sinilah Peran komunikasi politik Parabela dijalankan dalam pengambilan keputusan di Baruga, dengan memainkan perannya sebagai aktor lokal yang terbuka, bebas tanpa tekanan, sehat dengan otoritas yang memadai bagi pengambilan keputusan yang bersifat strategis sesuai suara mayoritas masyarakat Lapandewa.

Menurut Little John (1996:306) inti dari komunikasi kelompok adalah pengambilan keputusan. Setidaknya ada empat syarat atau kriteria sebuah kelompok, sehingga ia bisa dilihat dengan menggunakan perspektif komunikasi kelompok. Keempat kriteria tersebut adalah:

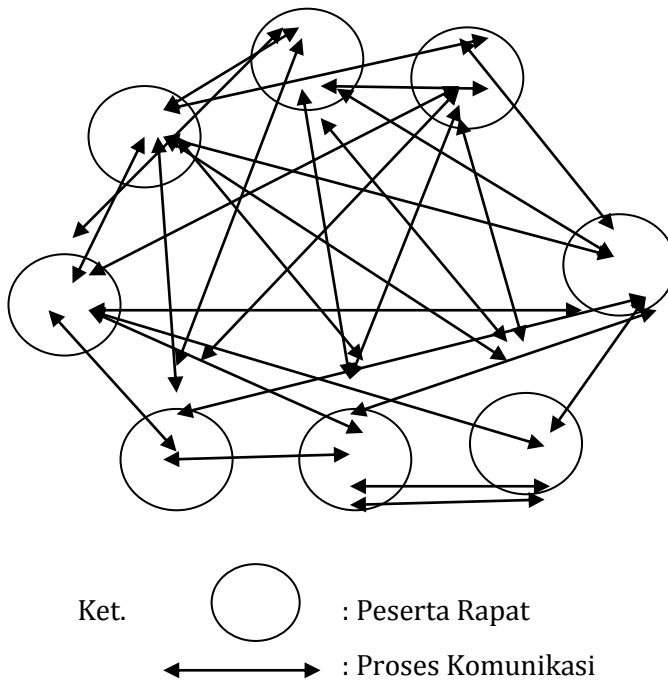
1. Lebih dari separuh anggota kelompok berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok.
2. Setiap anggota kelompok saling terkait dengan seluruh anggota kelompok.
3. Kelompok tetap eksis, meskipun seorang anggota keluar dari keanggotaan kelompok, atau terjadinya sebuah pemutusan jaringan atau link komunikasi.
4. Kelompok tersebut harus berisi minimal tiga orang anggota.

Saat pertemuan digalampa ini adalah silih berganti dalam artian seluruh peserta rapat memiliki hak suara yang sama. Sehingga pada saat tertentu ia bisa menjadi komunikator, dan pada saat tertentu pula pada saat rapat tersebut ia pun akan menjadi komunikan. Berikut pernyataan parabela Lapandewa tentang adanya hak suara yang sama di pertemuan di galampa:

*" Semua peserta pada saat rapat pansus dapat menjadi komunikator dan komunikan. Hal ini dikarenakan bahwa semua peserta rapat mempunyai hak suara dan juga hak dengar".
(Wawancara Februari 2012)*

Berdasarkan kondisi di atas maka komunikan ataupun komunikator pada kondisi ini dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 1: Skema Komunikator dan Komunikan dalam pertemuan



(Sumber : Hasil Penelitian 2012)

Mengacu dari skema di atas maka dapat kita lihat bahwa setiap peserta pertemuan mempunyai kesempatan yang sama. Dalam hal ini, terjadi secara silih berganti untuk memainkan perannya baik sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan dalam proses penyampaian pesan dalam hal pemekaran desa Lapandewa. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa alasan mengapa masyarakat dan adat menolak pemekaran, yaitu : tatanan adat yang sangat dijunjung akan rusak, akan menyebabkan rusaknya hutan adat yaitu Kaombo disebabkan adanya perluasan wilayah, akan melahirkan pemimpin lokal yang baru dalam hal ini parabela tanpa melalui proses adat yang ada, dan pranata – pranata adat akan terbagi dengan sendirinya yang menyebabkan kekeluargaan yang di jaga selama ini akan pecah.



Gambar 2 : Pertemuan penolakan Pemekaran desa di Baruga

Sejak selesai pertemuan tersebut Camat Lapandewa mempengaruhi masyarakat terus dan menggunakan 53 orang yang pro pemekaran, dan akhirnya baru terungkap di masyarakat bahwa di proposal terdapat juga tanda tangan Camat Lapandewa. Tanggal 24 Februari 2011 masyarakat mendatangi kantor camat dan mempertanyakan ke camat mengapa desa Lapandewa mau dimekarkan menjadi 2 desa, dialog berlangsung di Aula Kecamatan

Lapandewa antara camat, masyarakat dan utusan pemerintah Kabupaten Buton yaitu Asisten I yaitu Asina.

Seminggu berikutnya masyarakat mempertanyakan kembali kepada asisten 1 Pemerintah Kabupaten Buton, dan jawaban asisten 1 bahwa setelah berdialog dengan bupati hasilnya tidak ada pemekaran. Langkah ini diambil oleh masyarakat karena komunikasi yang dibangun dengan pemerintah tidak memberikan hasil, ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Nimmo bahwa kegiatan komunikasi yang dinggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi-kondisi konflik (Nimmo, 2000:9).

Namun pada tanggal 5 Juli 2011 pelaksana Sekertaris Daerah Kabupaten Buton mengundang : parabela , Ketua BPD, kepala desa, Moji (perangkat adat), Wati (perangkat adat), untuk datang ke kantor bupati Buton. setelah dua jam menantikan kehadiran bupati akhir datang juga dan pertemuan dilaksanakan dengan mempertemukan pihak yang pro dan kontra dengan pemekaran desa.

Beberapa catatan penting dalam dialog :

1. Kepala desa mempresentasekan bahwa yang ingin mekar ada 53 KK dan ada 600 KK yang menolak
2. Tiba-tiba muncul masyarakat yang pro dan mempresentasekan pada bupati bahwa di lapandewa ada 4 dusun dan bukan 2 dusun.
3. Saat itu bupati Tanya kembali pada kepala desa sebenarnya di lapandewa itu ada berapa dusun dijawab 2 dan yg pro mengatakan 4

Keputusan dari pertemuan antara kedua kelompok, bahwa akan diturunkan tim untuk mengecek langsung dilapangan kelayakan desa Lapandewa untuk dimekarkan. Besoknya pada tanggal 6 Juli 2012 yang turun bukan tim verifikasi tetapi undangan peresmian pemekaran Desa Lapandewa dan Desa Lapandewa Jaya pada tanggal 11 Juli 2011. Akhirnya kedatangan Bupati untuk meresmikan Pemekaran Desa di Lapandewa pada tanggal 11 Juli 2011

mengalami kegagalan disebabkan adanya aksi blokir jalan yang dipimpin langsung oleh Parabela dan diikuti oleh seluruh warga Lapandewa yang menyebabkan rombongan Bupati Buton dan muspida terhenti di perbatasan desa.

Aura panas konflik di lapandewa mulai menurun sejak ditetapkan pelaksana bupati yang bukan berasal dari kelompok pendukung bupati yang lama, kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaksana bupati untuk turun dilapangan dan berdialog dengan masyarakat dan keputusan pada tanggal 11 November 2011 bahwa SK pemekaran Desa Lapandewa cacat hukum karena tidak prosedural dan tidak proporsional sehingga memungkinkan untuk mengusulkan mencabut kembali SK yang telah ditetapkan oleh Dewan Kabupaten Buton. Namun perjuangan masyarakat Lapandewa belum berakhir karena sampai Bulan Februari 2012 janji pelaksana bupati tidak ada realisasi yang menyebabkan parabela bersama masyarakat Lapandewa turun kembali berdemo di kantor DPRD kabupaten Buton pada Bulan Maret 2012.

Sampai saat kondisi masih dalam status yang belum jelas namun dampak yang ditimbulkan telah terjadi perpecahan di masyarakat lapandewa. Kelima puluh tiga KK yang pro pemekaran dalam aktivitas tidak lagi tunduk pada adat, saat mereka melaksanakan perkawinan selama masa yang tidak menentu ini tidak lagi melalui adat yang selama ini setiap proses perkawinan harus atas izin adat yaitu parabela.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan komunikasi politik dalam penolakan pemekaran dipimpin langsung oleh pemimpin lokal dalam hal ini parabela telah menerapkan pendekatan komunikasi politik, dimana ada komunikator, komunikan, pesan serta saluran yang dipakai. Kedudukan dan peran Parabela saat ini, walaupun telah ada pemimpin formal (kades dan perangkatnya) namun Parabela masih memiliki kedudukan yang cukup penting dan sentral dalam kehidupan masyarakatnya. Kuatnya kedudukan dan peran politik

lokal dari parabela nampak dari masih berperannya parabela sebagai aktor politik, pemberi informasi, pemangku adat, mediator dan pegambil keputusan dalam menolak pemekaran desa.

Fungsi Parabela sebagai pengambil keputusan dan mediator sangatlah diperlukan pula oleh warga masyarakat, karena itu kehadiran Parabela sebagai sebagai tokoh pengambil keputusan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilanarganya. Diyakini pula bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Parabela memiliki kekuatan sakral, siapa yang melanggar akan memperoleh akibatnya berupa "bala". Demikian pula sebaliknya bila Parabela salah dalam mengambil keputusan, bala juga akan menimpa dirinya (Parabela).

Model kepemimpinan Parabela yang selalu melibatkan berbagai komponen dalam masyarakatnya ketika mengambil keputusan atau merencanakan sesuatu, menunjukkan bahwa model kepemimpinan Parabela adalah kepemimpinan yang demokratis. Kedemokratisan inilah yang dinilai oleh masyarakat memenuhi rasa keadilan dan keamananarganya. Dalam persepsi masyarakat seorang pemimpin bukan hanya dapat mengayomi masyarakatnya tetapi juga mampu memberi rasa aman kepada masyarakatnya dari berbagai keadaan yang mereka tidak kehendaki jika pemekaran desa terwujud.

Daftar Pustaka

- DeVito, Joseph A. 1989. *The Interpersonal Communication*. Harpers and Row Publisher. New York.
- De Vries, Reinout E. Bakker, Angeique Pieper. Oostenveld, Wyneke (2010) . *Leadership Communication? The Relations of Leaders' Communication Styles with Leadership Styles, Knowledge Sharing and Leadership Outcomes*. J Bus Psychol, 25, 367-380.
- Ibrahim, Abd Syukur. 1994. *Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi*. Usaha Nasional. Surabaya. Indonesia.
- Johnson, M. 1992. *Lore : Capturing Traditional Environmental Knowledge*. IDRC Ottawa-Canada.

- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Kepemimpinan Abnormal itu ?*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Little John, W. Stephen. 1996. *Theories Of Human Communication (Fifth Edition)*, wadsworth Publishing Company: California.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komuniaksi Politik: Komunikator: Pesan dan Media*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rahkmat, Jalaludin. 1993. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Rahman, Ruslan. 2005. *Parabela di Buton* . Disertasi. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Schoorl, Pim.2003. *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton* (terjemahan G. Wiyan). Jambatan Jakarta.
- Zaenu, La Ode, 1984. *Buton Dalam Sejarah Kebudayaan*. Suradipa. Surabaya.
- Zahari, Mulku 1977, *Sejarah dan Adat Fiy darul Butuuni*, Koleksi Pribadi Belum dipublikasikan. Jakarta.